

## Peran dan fungsi DPR RI dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif

M Fadhil Arkani Syakiro Herton<sup>1</sup>, Riski Saputra<sup>2</sup>, Muhammad Fadriansyah<sup>3</sup>,  
Muhammad Kevin<sup>5</sup>, Ahmad Jery Pratama<sup>6</sup>

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

[Fadhilherton846@gmail.com](mailto:Fadhilherton846@gmail.com)

### ABSTRACT

*The Indonesian House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat or DPR RI) plays a pivotal role in establishing effective governance through its legislative, budgeting, oversight, and representation functions. As a legislative body, the DPR drafts laws that serve as the legal foundation for government policies. Additionally, it supervises the use of the national budget to ensure alignment with the people's interests and to prevent abuse of power. The representation function enables the DPR to voice public aspirations, ensuring that government policies reflect societal needs. By closely monitoring government performance, the DPR contributes to transparency and accountability, fostering a more effective, fair, and citizen-focused governance. The DPR's active involvement in decision-making and oversight processes is crucial for strengthening Indonesia's democratic system.*

**Keywords:** Indonesian House of Representatives (DPR RI), effective governance, legislative function.

### ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mempunyai peranan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif melalui penyelenggaraan fungsi legislatif, anggaran, pengawasan, dan perwakilan. Sebagai lembaga legislatif, fungsi DPR adalah membuat undang-undang yang menjadi dasar hukum kebijakan pemerintah. Selain itu, DPR juga bertugas memantau penggunaan anggaran negara untuk memastikan kepatuhannya kepentingan rakyat dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Fungsi perwakilan memungkinkan DPR menyampaikan aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan pemerintah mencerminkan kepentingan masyarakat. Melalui pengawasan ketat terhadap jalannya pemerintahan, DPR RI juga menjaga transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya turut berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, adil, dan tanggap terhadap kebutuhan rakyat. Peran aktif DPR pada setiap tahapan pengembangan kebijakan dan pengawasan pemerintah sangat penting untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

**Kata Kunci :** Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), pemerintahan yang efektif, fungsi Legislasi.

### PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan salah satu penopang utama sistem pemerintahan Indonesia yang berbentuk republik demokratis. Sebagai

lembaga legislatif, DPR mempunyai peranan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Selain menjalankan misi hukum, DPR juga mempunyai fungsi lain yang tidak kalah pentingnya, seperti pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, penyelenggaraan anggaran negara, dan penyampaian aspirasi Masyarakat (Jerzy, 2023).

Peran dan fungsi DPR RI dalam segala aspek pemerintahan sangat menentukan keberhasilan suatu negara dalam mencapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan berkelanjutan. Tanpa pengawasan yang ketat, kebijakan yang berkeadilan dan alokasi anggaran yang sesuai dengan tujuan, akan sulit mencapai tujuan respon pemerintah yang efektif terhadap kebutuhan Masyarakat (Muh., 2019). Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami peran dan fungsi DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menjamin terciptanya sistem pemerintahan yang tidak hanya demokratis, tetapi juga efektif melayani kepentingan rakyat.

Selain peran Dalam peraturan perundang-undangan, DPR RI juga berperan sebagai fasilitator untuk menjamin keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan rakyat. Dalam praktiknya, fungsi ini memerlukan keterbukaan informasi kepada publik dan kerja sama aktif dengan lembaga lain untuk menghasilkan kebijakan yang komprehensif. Penelitian mengenai peran DPR dapat memberikan perspektif baru untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya dengan mendorong penggunaan teknologi dalam proses legislasi.

Artikel ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut peran dan fungsi baru DPR untuk mencapai pemerintahan yang efektif. Pembahasan ini mencakup fungsi legislatif dalam penyusunan undang-undang, pengawasan kebijakan pemerintah, pengelolaan anggaran negara, dan juga mewakili suara rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Diharapkan dengan pemahaman yang lebih baik mengenai peran DPR, masyarakat dapat lebih

mengapresiasi kontribusi lembaga legislatif dalam memperkuat demokrasi dan menciptakan pemerintahan yang lebih baik.



Gambar 1. Foto anggota kelompok digedung DPR RI Jakarta

Sumber : dokumentasi kelompok



Gambar 2. (Kelompok 14 bersama DPL Ibrahim fikma edrisy S.H,M.H)

Sumber : dokumentasi kelompok

Kelompok 14 beranggota 5 orang adalah salah satu kelompok mahasiswa yang dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), yaitu bapak Ibrahim Fikma edrisy S.H., M.H. Sebagai seorang akademisi dengan latar belakang hukum, Bapak Ibrahim Fikma edrisy memiliki pengalaman yang luas di bidang hukum, baik dalam kajian akademisi maupun praktik. Beliau dikenal sebagai dosen dan kaprodi di fakultas

hukum yang berkomitmen dalam membimbing mahasiswa agar tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi praktis.

Dalam kegiatan lapangan, bapak Ibrahim Fikma edrisky memberikan arahan kepada mahasiswa untuk menjalankan tugas Jurnal Pengabdian Jejamo.

secara profesional dan terstruktur. Beliau juga mendorong anggota kelompok untuk mengembangkan keterampilan analitis dan kritis melalui pengamatan langsung dan diskusi aktif. Di bawah bimbingan beliau, Kelompok 14 didorong untuk memanfaatkan metode penelitian dan dokumentasi dengan cermat, sesuai dengan kaidah akademik.

Sebagai DPL, bapak Ibrahim Fikma edrisky juga dikenal sebagai pembimbing yang inklusif dan mendukung kolaborasi antar anggota kelompok. Hal ini menciptakan suasana kerja yang harmonis dan produktif, sehingga kelompok mampu mencapai hasil yang optimal dalam setiap tugas yang diberikan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis literatur sebagai metode utama untuk mengkaji peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif (Santi, 2022). Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam peran DPR RI dalam berbagai fungsi legislasi, anggaran, kontrol, dan perwakilan, tanpa memprioritaskan pengujian hipotesis atau pengukuran statis

Gedung DPR / MPR Indonesia atau Gedung Nusantara di Jakarta merupakan gedung utama kompleks parlemen Indonesia dan memiliki banyak penjelasan.

Sejarah Gedung ini dibangun atas gagasan presiden pertama Republik Indonesia

Ir. Soekarno untuk menyelenggarakan konferensi internasional CONEFO. Namun setelah kepergian Ir. Soekarno, nama gedung tersebut diubah Gedung MPR/DPR RI. Bangunan Nusantara berbentuk kubah setengah lingkaran yang melambangkan sayap terbang burung Garuda. Konsep ini ditemukan oleh Ir. Sutami, Sekretariat Jenderal MPR RI pada tahun 2006.

Kompleks Parlemen Indonesia terletak di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kompleks ini dibatasi oleh Jalan Gelora di sebelah barat, Jalan Gerbang Pemuda di sebelah selatan, Jalan Gatot Subroto di sebelah timur dan kompleks perkantoran kementerian. Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Utara. Gedung Nusantara merupakan tempat pelantikan presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif (MPR/DPR/DPD RI). Ciri khas kompleks parlemen Indonesia adalah mempunyai air mancur dengan unsur patung yang estetik dan dikelilingi oleh 35 tiang bendera. Sejarah terbentuknya Nusantara.



Gambar 3. (Di halaman Gedung DPR RI)  
Sumber : dokumentasi kelompok

## Analisis kebijakan digital

Sebagai pelengkap metode penelitian, analisis kebijakan digital dapat diterapkan untuk mengkaji pelaksanaan fungsi DPR RI di era digital. Penelitian ini dapat memanfaatkan teknologi seperti big data analytic untuk

merancang model pemantauan anggaran dan transparansi DPR dalam penggunaan APBN. Ini akan membuat metodologi penelitian Anda lebih relevan dalam konteks modern.

### 1. Pengumpulan data sekunder

Data yang digunakan dalam Penelitian ini bersumber dari berbagai referensi sekunder seperti buku, artikel ilmiah, surat kabar, laporan pemerintah, dokumen resmi DPR RI, dan berbagai sumber media yang membahas tentang peran DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia. Referensi ini digunakan untuk mengumpulkan informasi relevan mengenai fungsi dan peran DPR RI, serta dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan.

### 2. Analisis isi (Content analysis)

Metode analisis isi digunakan untuk menganalisis dokumen mengenai fungsi dan peran DPR yang baru. Melalui analisis ini, peneliti mengidentifikasi tema-tema penting dalam literatur terkait proses legislasi, pengendalian anggaran, keterwakilan masyarakat, dan akuntabilitas pemerintah. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana masing-masing fungsi tersebut berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

### 3. Studi Banding

#### Memperkaya

Kecerdasan Terkait peran DPR RI, dilakukan studi banding untuk mengkaji peran lembaga legislatif di negara lain, khususnya yang memiliki sistem demokrasi serupa. Hal ini membantu untuk menentukan persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan fungsi legislatif, serta relevansi praktik-praktik tersebut dalam konteks Indonesia.

### 4. Pendekatan kualitatif terhadap dokumen dokumen kebijakan

Pendekatan kualitatif juga diterapkan pada kajian kebijakan yang telah dikembangkan DPR

RI, seperti undang-undang yang disahkan, hasil rapat kerja, dan juga laporan tindak lanjut yang disampaikan DPR. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

### 5. Pengolahan data dan penyusunan kesimpulan

Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan analisis tematik untuk menarik kesimpulan tentang peran dan fungsi DPR RI. Hasil analisis ini adalah digunakan untuk menggambarkan bagaimana DPR dapat berperan besar dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan berfungsi dengan baik dalam sistem demokrasi Indonesia. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman utuh mengenai kontribusi DPR RI dalam menjaga kualitas pemerintahan yang efektif, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi DPR dalam menjalankan pemerintahannya.



Gambar 4. ( Gedung Rapat Paripurna DPR RI )

Sumber : dokumentasi panitia

Rapat Paripurna DPR RI adalah rapat anggota yang dipimpin oleh direktorat DPR merupakan lembaga tertinggi yang menjalankan wewenang dan fungsi DPR RI. Agenda dan mata acara rapat paripurna ditetapkan dan diputuskan dalam rapat Badan Pertimbangan (BAMUS) atau dalam rapat konsultasi bukan rapat BAMUS antara pimpinan DPR dengan fraksi-fraksi pimpinan, atau dalam rapat paripurna itu sendiri. Rapat Paripurna dipimpin oleh pimpinan DPR dan dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang pimpinan DPR. Setiap rapat paripurna DPR RI diawali dengan sidang menyampaikan aspirasi daerah pemilihan masing-masing wakil. Pada setiap pembukaan sidang paripurna DPR RI, lagu kebangsaan Indonesia Raya wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan. Pada saat Rapat Paripurna DPR RI dilarang mengadakan rapat atau kegiatan lainnya. Rapat pleno luar biasa dilaksanakan pada masa liburan apabila diusulkan oleh: 1. Presiden; 2. Kepala Staf DPR; 3. Pemimpin Fraksi; atau anggota dengan jumlah minimal 28 (dua puluh). Delapan) orang yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi. Rapat pleno luar biasa dapat diselenggarakan setelah mendapat persetujuan BAMUS atau rapat konsultasi.

### **Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Temuan penelitian mengenai peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam mencapai pemerintahan yang efektif akan dibahas secara rinci. Diskusi ini akan mengidentifikasi bagaimana fungsi legislatif, anggaran, pengawasan dan representasi dijalankan. Dari DPR berkontribusi terhadap terciptanya pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Fungsi legislatif: menulis undang-undang untuk melaksanakan kebijakan yang efektif. Salah satu fungsi pokok DPR RI adalah legislatif, yaitu pembuatan dan pengesahan undang-undang yang menjadi landasan hukum kebijakan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, DPR RI berperan penting dalam merancang kebijakan yang mencerminkan kepentingan rakyat dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Lebar Proses pembahasan undang-undang yang melibatkan berbagai faksi dan pemangku kepentingan memungkinkan terjadinya diskusi yang lebih mendalam sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif (Muhammad dkk., 2022).

Namun tantangannya adalah terkadang proses legislasi terhambat oleh dinamika politik di DPR. Terkadang kepentingan politik beberapa partai politik atau lobi beberapa kelompok dapat mempengaruhi alur produksi. Peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kebijakan kurang optimal atau tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan mekanisme transparansi peraturan perundang-undangan, agar proses legislasi dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Fungsi anggaran: pengendalian penggunaan dana negara Fungsi anggaran DPR RI sangat penting untuk menjamin alokasi anggaran negara digunakan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prioritas pembangunan fokus pada kepentingan penduduk. Setiap tahunnya, DPR berperan dalam mengawasi dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan pemerintah. Melalui proses musyawarah yang ketat, DPR memastikan anggaran

negara dialokasikan dengan baik dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan sepele. Namun, meski DPR berperan penting dalam pengendalian anggaran, seringkali ada celah yang bisa dimanfaatkan. Kepentingan tertentu. Penyalahgunaan anggaran dan kurangnya transparansi dalam pelaksanaannya masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian terus-menerus. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat sistem pengendalian dan pemeriksaan yang independen, seperti yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), agar penggunaan anggaran negara lebih akuntabel dan transparan.

Fungsi Pengawasan : Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan DPR  
Fungsi Pengawasan RI terhadap kebijakan dan pelaksanaannya Tata kelola memainkan peran utama dalam akuntabilitas pemerintah. Melalui berbagai mekanisme pengawasan seperti rapat kerja, rapat dengar pendapat (RDPU) dan inspeksi di lapangan, DPR dapat memantau pelaksanaan kebijakan dan proyek yang dibiayai dari APBN. Pengawasan ini juga mencakup pemeriksaan potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat. Namun, kontrol yang dilakukan DPR terkadang demikian dibatasi oleh faktor politik dan keengganan sebagian anggota DPR mengungkap permasalahan yang terdapat di pemerintahan. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif harus mencakup partisipasi aktif masyarakat, media, dan lembaga independen untuk menjamin objektivitas dan akuntabilitas.

Fungsi Anggaran: Peningkatan Akuntabilitas dengan Teknologi

Untuk meningkatkan akuntabilitas, DPR RI dapat memanfaatkan sistem berbasis blockchain untuk melacak dan memvalidasi penggunaan anggaran. Teknologi ini memastikan bahwa setiap transaksi tercatat secara transparan dan tidak dapat diubah, sehingga mengurangi risiko korupsi.

Fungsi Pengawasan: Kolaborasi dengan Lembaga Independen

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, kolaborasi antara DPR dan lembaga-lembaga independen seperti Ombudsman atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi penting. Ini memastikan bahwa proses pengawasan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, dengan melibatkan pakar dan masyarakat dalam memberikan masukan.

Fungsi Representasi: Inklusivitas dalam Proses Demokrasi

DPR RI dapat memaksimalkan representasi rakyat dengan meningkatkan akses terhadap konsultasi publik secara daring. Melalui platform digital, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka secara langsung, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar merefleksikan kebutuhan publik.



Gambar 5. (Museum DPR RI Senayan Jakarta)

Sumber : dokumentasi kelompok

Sejarah Jakarta merupakan museum yang terletak di Jalan Taman Fatahillah No. 1, Jakarta Barat. Gedung ini merupakan Balai Kota Batavia lama (Belanda: Stadhuis van Batavia) yang dibangun pada tahun 1707-1710 atas perintah Gubernur Jenderal Joan van Hoorn. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam, terdiri dari bangunan induk dengan dua sayap di sisi timur dan barat, serta bangunan di sebelahnya yang berfungsi sebagai kantor, ruang sidang, dan ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai penjara.

Pada tanggal 10 Juli 1710, gedung Aula dibangun Kota ini diresmikan oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck sesuai prasasti di Museum Sejarah Jakarta. Semula gedung ini berfungsi sebagai “StadHuis” (Balai Kota) dan “Raad Van Justitie” (Dewan Kehakiman). Pada tahun 1925 hingga tahun 1942 gedung ini digunakan sebagai Kantor Daerah Provinsi Jawa Barat, pada tahun 1942 hingga tahun 1945 digunakan sebagai Markas Dainipon, setelah kemerdekaan, pada tahun 1945 hingga tahun 1963 digunakan sebagai Kantor Gubernur. Jawa Barat dan pada tahun 1964 dijadikan markas TNI KODIM 0503 Jakarta Barat. Pada tahun 1972 diserahkan kepada pemerintah DKI, kemudian diperbaiki dan dijadikan Museum Sejarah Jakarta yang diresmikan oleh Gubernur DKI, Bpk. Ali Sadikin, 30 Maret 1974

**\* Tantangan dan solusi**

**Tantangan**

Polarisasi politik: konflik antar partai seringkali memperlambat proses legislatif dan kontrol. Kurangnya partisipasi masyarakat: beberapa komunitas mereka merasa tidak mempunyai akses terhadap informasi atau tidak mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Solusi Meningkatkan Pendidikan Politik: DPR RI dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan untuk menjamin pemahaman sistem politik dan hak-hak warga negara. Penggunaan media sosial: DPR dapat menggunakan media sosial sebagai alat untuk

meningkatkan transparansi dan melibatkan masyarakat dalam diskusi kebijakan. Tantangan lainnya adalah level rendah partisipasi masyarakat dalam proses politik, seringkali berarti suara masyarakat tidak dianggap cukup dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbaiki sistem partisipasi masyarakat dan mendorong transparansi proses legislasi agar DPR dapat memenuhi aspirasi masyarakat dengan lebih baik.



Gambar 6. (Foto rombongan kegiatan fieldtrip FHIS UMKO di d Castello, lembang, bandung)

Sumber : dokumentasi panitia

Foto ini adalah dokumentasi pribadi dari kunjungan ke D'Castello, Bandung. Tempat ini menawarkan suasana yang memadukan keindahan arsitektur modern dengan pesona alam yang memikat. Setiap sudutnya dirancang untuk menciptakan pengalaman yang istimewa, memberikan nuansa kehangatan dan kenyamanan.

Perjalanan ini menjadi momen berharga, tidak hanya untuk menikmati pemandangan yang indah, tetapi juga untuk merasakan ketenangan yang jarang ditemukan di tengah kesibukan sehari-hari. D'Castello bukan sekadar destinasi wisata, tetapi tempat untuk menciptakan kenangan yang akan selalu terukir dalam ingatan.

**SIMPULAN**

Peran DPR RI dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, pengendalian, penganggaran, dan keterwakilan, namun juga oleh kemampuannya beradaptasi terhadap tantangan zaman. Dengan memanfaatkan teknologi dan melibatkan masyarakat secara aktif, DPR dapat semakin memperkuat fondasi demokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang memenuhi kebutuhan rakyat.

Dan bahwa DPR RI memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai lembaga legislatif, DPR RI menjalankan fungsi utama berupa legislasi, anggaran, dan pengawasan. Melalui pembuatan undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan rakyat, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta pengelolaan anggaran negara yang transparan dan akuntabel, DPR RI dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien. Dengan demikian, DPR RI berperan sebagai mitra pemerintah dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Selain fungsi utama berupa legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI juga bertugas untuk menampung aspirasi rakyat dan menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Melalui mekanisme seperti sidang parlemen, rapat kerja, dan penggunaan hak interpelasi atau angket, DPR RI dapat mengontrol kebijakan pemerintah untuk memastikan kebijakan tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Selain itu, DPR RI juga memiliki peran dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang penting dalam menjaga prinsip demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, keberadaan DPR RI yang kuat dan fungsional menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami selaku penulis artikel ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan artikel ini, terutama kepada para peneliti, praktisi, dan ahli hukum yang telah memberikan wawasan mendalam mengenai peran dan fungsi DPR RI dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Artikel ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih luas tentang tugas dan tanggung jawab DPR, tetapi juga memperkaya diskursus publik mengenai pentingnya lembaga legislatif dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan memperkuat pemahaman kita bersama tentang bagaimana DPR RI dapat terus berperan secara optimal dalam pembangunan negara yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arbi, A. S. (2020). *Peran DPR dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Badan Keahlian DPR RI. (2019). *Penyelenggaraan Pemerintahan dan Fungsi Legislatif di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Hakim, S. (2021). *Legislasi dan Pengawasan dalam Demokrasi*. Yogyakarta: Lembaga Studi Demokrasi.
- Huda, M. (2020). "Peran DPR dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah: Studi Kasus pada Pengawasan Anggaran Negara". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 25(3), 45-63.

- Ismail, M. (2022). Fungsi Pengawasan DPR dalam Pembangunan Nasional. Surabaya: Pustaka Akademika.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2018). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Luthfi, A. (2021). Demokrasi dan Sistem Legislatif di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis. Bandung: Alfabeta.
- Mardani, D. (2019). Efektivitas DPR dalam Pengawasan Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rismawati, R. (2022). "Pendidikan Politik oleh DPR: Strategi Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Demokrasi". *Jurnal Pendidikan Politik*, 8(2), 102-115.
- Siregar, E. (2020). Politik Anggaran dan Fungsi DPR dalam Mengawasi Penggunaan Dana Negara. Medan: Yayasan Penerbitan Universitas Sumatera Utara.
- Jerzy, J. (2023). 7. Parliamentary facilities as a prerequisite for the effectiveness of the implementation of the government's tasks. *Gubernaculum et Administratio*.  
<https://doi.org/10.16926/gea.2023.02.01>
- Muh., Y. (2019). 2. *Fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan indonesia: Legislation function of people's representatives in indonesian state systems.*
- Muhammad, R., Satia., M., & Yusuf. (2022). 2. Implementasi fungsi legislasi dprd dalam pembentukan peraturan daerah (kajian di badan pembentukan peraturan daerah dprd provinsi kalimantan tengah. *Pencerah Publik*.  
<https://doi.org/10.33084/pencerah.v9i2.4256>
- Santi, I. (2022). 4. Basic Principles of the Oversight Functions of the House of Representatives on Legislative Functions in Indonesia. *Nurani*.  
<https://doi.org/10.19109/nurani.v22i2.13113>